

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gereja pada hakikatnya merupakan komunitas umat beriman yang didasari prinsip-prinsip kekristenan, seperti kebenaran, keadilan, kasih, dan integritas moral.¹ Meskipun demikian, keberadaan gereja tidak bisa dilepaskan dari konteks lingkungan sosialnya. Sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat, gereja turut mengalami berbagai dinamika sosial dan politik yang terjadi, termasuk dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum. Di Indonesia, pemilu berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Namun, seringkali proses demokrasi ini tercoreng oleh praktik politik uang (*money politics*), yaitu pemberian materi atau fasilitas tertentu guna memengaruhi pilihan politik warga. Praktik semacam ini tidak hanya merusak inti demokrasi, tetapi juga berdampak pada merenggangnya hubungan sosial, termasuk dalam kehidupan sehari-hari berjemaat.²

Politik uang telah menjadi masalah yang terus berulang dalam setiap gelaran pemilu di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa

¹ Irene et al., "Politik Uang Dalam Tinjauan Etika Kristen," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 SE-Articles (January 3, 2025): 2602–2609, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1876>.

² Azry Yusuf et al., "Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan," *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (2024):104–108.

praktik ini tidak hanya dilakukan oleh para kandidat politik, melainkan juga melibatkan jaringan masyarakat di tingkat komunitas lokal, termasuk kelompok-kelompok keagamaan. Politik uang menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan, di mana para pemilih ditempatkan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan demi kepentingan politik jangka pendek. Kondisi ini secara hal ini secara tegas tidak sejalan dengan kaidah-kaidah demokrasi yang senantiasa mengedepankan kedaulatan rakyat dan hak kebebasan memilih berdasarkan pertimbangan nurani.³

Di wilayah Toraja, Sulawesi Selatan, fenomena politik uang tidak hanya marak di ranah publik, tetapi juga mulai masuk ke dalam lingkungan gerejawi, tidak terkecuali di Gereja Toraja Jemaat Pongrea'. Jemaat ini berkembang di tengah masyarakat Toraja yang masih menjunjung tinggi ikatan kekerabatan dan nilai-nilai adat, sehingga hubungan sosial dan kepentingan politik setempat seringkali sulit dipisahkan. Saat pemilu berlangsung, jaringan sosial tersebut kerap dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk menggalang dukungan melalui pemberian uang atau bantuan material. Keterlibatan ini tidak hanya mencakup anggota jemaat pada umumnya, tetapi juga merambah kalangan pemuda dan para pemuka gereja.

³ Mohammad Arqon, Danil Mustafa, and Muhammad Gogon, "Pencegahan Politik Uang Di Indonesia," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2024): 12–22.

Sebagai salah satu lembaga keagamaan di Tana Toraja, Gereja Toraja memiliki peran strategis dalam membentuk moral dan etika jemaat. Namun, saat praktik politik uang mulai meresap dalam kehidupan berjemaat, gereja menghadapi tantangan besar untuk menjaga kemurnian persekutuannya.⁴ Jemaat Pongrea', sebagai bagian dari Gereja Toraja, turut merasakan dampak dari dinamika ini. Berdasarkan penelusuran awal, ditemukan temuan awal bahwa pada Pemilu 2024, sejumlah anggota jemaat terlibat dalam praktik politik uang, baik sebagai penerima maupun sebagai perantara. Situasi ini memicu ketegangan sosial, kecurigaan di antara sesama warga gereja, serta mengikis kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi utama dalam membangun kebersamaan jemaat.

Persekutuan Kristen, yang dalam bahasa Alkitab dikenal sebagai koinonia, merupakan ikatan spiritual yang berlandaskan kasih, kesetiaan, dan semangat saling membangun. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 1:9 “menegaskan bahwa Allah memanggil umat-Nya untuk bersatu dalam persekutuan dengan Yesus Kristus”.⁵ Oleh karena itu, persekutuan jemaat tidak bisa dipahami hanya sebagai sekadar kumpulan orang yang beribadah bersama, melainkan adalah ikatan iman yang menuntut setiap anggotanya untuk

⁴ Annon Palulun, “Gereja Dan Politik,” *Kinaa: Jurnal Teologi* 9, no. 1 (April 12, 2025): 1–12, <https://doi.org/10.0302/c78bb742>.

⁵ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab 1 Korintus 1:9* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1974).

saling peduli, mengasihi, dan memikul tanggung jawab satu sama lain. Akan tetapi, praktik politik uang telah menggeser fondasi persekutuan ini menuju hubungan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi sesaat dan transaksional.

Berbagai dampak politik uang terhadap persekutuan jemaat dapat diamati dari beberapa aspek. Pertama, munculnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan di antara warga jemaat yang memiliki perbedaan pilihan politik. Kedua, menurunnya partisipasi dalam kegiatan gerejawi karena waktu dan perhatian lebih banyak tersedot untuk aktivitas politik praktis. Ketiga, terjadinya perpecahan di lingkungan jemaat, meskipun tidak selalu terlihat jelas, secara perlahan mengikis solidaritas persaudaraan. Keempat, melemahnya kesaksian gereja di hadapan masyarakat karena dianggap tidak konsisten antara nilai-nilai iman yang diajarkan dengan perilaku politik para anggotanya.⁶

Praktik politik uang jelas bertentangan dengan kaidah-kaidah etika yang bersumber dari Alkitab. Kitab Suci secara tegas menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan kesetiaan sebagaimana termuat dalam Mikha 6:8 yang berkata "Telah diberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan

⁶ Fredi Ardo Purba, Bertha Wandasari Sinukaban, and Maria Sinta Sembiring, "Terjualnya Moralitas: Kajian Etika Kristen Terhadap Praktik Politik Uang Di Kabupaten Simalungun," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 8, no. 1 (2024): 53–62.

Allahmu? Lebih lanjut, Keluaran 23:8 berkata “Suap janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar” dalam ayat ini secara langsung melarang praktik tindakan penyuapan, sebab praktik sogok-menygok ini mampu mengaburkan pandangan mereka yang menyaksikan dan memutarbalikkan perkataan individu yang benar. Politik uang bukan hanya menjadi masalah moral individual, tetapi juga ancaman nyata terhadap keutuhan persekutuan sebagai tubuh Kristus.⁷

Untuk memperdalam analisis, studi ini akan menggunakan teori rasionalitas komunikatif yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas sebagai alat analisis. Habermas, seorang filsuf dan sosiolog Jerman dari Mazhab Frankfurt, mengembangkan teori tindakan komunikatif yang menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang jujur, setara, dan bebas dari kepentingan manipulatif sebagai dasar kehidupan sosial yang sehat. Menurut Habermas (1984), rasionalitas komunikatif adalah kemampuan individu untuk mencapai pemahaman bersama melalui komunikasi yang bebas, jujur, dan terbuka. Berbeda dengan rasionalitas instrumental yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan pribadi, rasionalitas komunikatif

⁷ Zulkifli Oddeng and Wilayanto, “Politik Uang Dalam Perspektif Etika Absolutisme Bertingkat Norman L. Geisler Dan Keluaran 18:21,” *Jurnal Misioner* 1, no. 1 (2021): 77–98.

mengedepankan upaya mencapai kesepakatan berdasarkan argumen-argumen yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Dalam komunikasi ideal, menurut Habermas, para partisipan harus memenuhi empat jenis klaim validitas, yaitu: klaim kebenaran (pernyataan sesuai fakta), klaim ketepatan (tindakan komunikasi selaras dengan norma), klaim kejujuran (pihak yang berkomunikasi menyampaikan maksud secara tulus), dan klaim komprehensibilitas (pernyataan dapat dipahami semua pihak).⁹ Politik uang secara nyata merusak keempat klaim validitas tersebut. Praktik ini menciptakan pola komunikasi yang manipulatif, di mana pihak pemberi imbalan menyembunyikan motif sebenarnya di balik pemberian materi, sementara pihak penerima terdorong untuk menentukan pilihan politik bukan berdasarkan argumen rasional, melainkan karena imbalan sesaat.

Habermas juga memperkenalkan gagasan ruang publik sebagai arena sosial tempat warga masyarakat dapat berdialog secara leluasa mengenai berbagai masalah bersama tanpa tekanan dari negara atau kepentingan ekonomi. Dalam ruang publik yang demokratis, komunikasi yang ideal memungkinkan terbentuknya opini publik yang rasional serta legitimasi

⁸ Dimas Rahman Rizqian, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas," *Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan* 8, no. 2 (2023): 1–21.

⁹ Muhammad Ersya Syauqy and Dendy Wahyu Anugrah, "Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas Dan Implikasinya Terhadap Podcast Di Indonesia," *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)* 1, no. 2 (2024): 158–170.

politik yang sehat.¹⁰ Dalam konteks jemaat, ruang publik bisa diartikan sebagai ruang persekutuan di mana warga gereja berdiskusi dan mengambil keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai iman. Namun, politik uang telah mencemari ruang publik ini, menggantikan dialog yang sehat dengan relasi transaksional yang berdampak merusak terhadap persekutuan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengulas praktik politik uang dalam konteks Toraja dan gereja. Salah satu studi yang relevan di tulis oleh Frangkly dalam risetnya tentang Gereja dan Politik Analisis Peran Gereja Toraja Jemaat Sangpolo Bungin Klasik Nonongan Salu dalam Menyikapi Praktek Politik uang dalam Pemilu menemukan bahwa peran gereja sangat penting dalam politik. ¹¹Jery parimba dalam studinya menuliskan mengenai teologi politik dan partisipasi gereja pada Pemilu Legislatif 2024 di Toraja mendapati bahwa gereja memiliki peran strategis dalam pendidikan politik jemaat, meskipun masih terbatas pada aspek berdasarkan norma.¹² Sementara itu, irene dalam penelitiannya tentang politik uang dalam tinjauan etika Kristen menyoroti implikasi politik uang terhadap moralitas individu dan komunitas gereja.¹³

¹⁰ Yadi Supriadi, "Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas," *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017): 19.

¹¹ Saranga, Frangkly Sanning (2021) *Gereja dan Politik Analisis Peran Gereja Toraja Jemaat Sangpolo Bungin Klasik Nonongan Salu dalam Menyikapi Praktek Politikuang dalam Pemilu*. Scholar thesis, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja.

¹² Jery Parimba, "Rasionalitas Komunikasi Sebagai Pilihan Gereja Dalam Melawan Politik Uang Di Toraja," *Melo: Jurnal Studi Agama-agama* 1, no. 1 (2021): 49–63.

¹³ Irene Silalahi, Nuraini Lumbantobing, Romenak Hutasoit, dan Hisardo Sitorus, "Politik Uang dalam Tinjauan Etika Kristen," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2025).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum atau terfokus pada kelompok tertentu, sehingga belum secara spesifik mengkaji dampak politik uang terhadap keseluruhan kehidupan persekutuan jemaat dalam satu konteks lokal. Kajian-kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek etis dan upaya pencegahan, namun belum secara mendalam mengkaji pengalaman nyata serta dinamika hubungan sosial di dalam jemaat sebagai dampak langsung dari praktik politik uang. Dengan demikian, terdapat kekosongan akademis yang perlu diisi, yaitu belum adanya studi yang menganalisis secara mendalam dampak praktik politik uang di gereja toraja jemaat pongrea' klasis bittuang se'seng dengan memanfaatkan teori Habermas sebagai kerangka analisis.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat pemilihan umum akan terus berlangsung secara periodik di Indonesia. Pemilu 2024 memang telah berlalu, namun praktik politik uang dipastikan akan kembali mewarnai pemilu-pemilu yang akan datang. Apabila praktik politik uang tidak dikaji dan disikapi dengan serius, gereja berpotensi kehilangan fungsi strategisnya sebagai agen pembentukan moral dan spiritual di tengah masyarakat Toraja. Persekutuan jemaat dapat terus merosot dan terpecah oleh kepentingan politik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai iman Kristen. Lebih jauh lagi, gereja dapat kehilangan relevansinya dalam membangun kehidupan sosial yang adil dan bermartabat.

Dari sisi kebaruan, studi ini menawarkan pendekatan kontekstual dengan memusatkan perhatian pada Jemaat Pongrea' sebagai lokasi kajian, serta Pemanfaatan teori rasionalitas komunikatif Habermas juga memberikan sudut pandang baru dalam menganalisis dampak politik uang terhadap persekutuan jemaat.

Berdasarkan uraian di atas, maka studi ini menjadi penting untuk dilaksanakan guna mengkaji secara mendalam dampak praktik politik uang di Gereja Toraja Jemaat Pongrea' Klasis Bittuang Se'seng berdasarkan teori rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas. Sebagai mahasiswa Program Studi Kepemimpinan Kristen, penulis merasa terdorong untuk mengkaji persoalan ini karena kepemimpinan Kristen tidak hanya berkaitan dengan memimpin gereja secara internal, tetapi juga membimbing jemaat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk praktik politik uang yang dapat merusak persekutuan. Dalam studi kepemimpinan Kristen, integritas, keteladanan, dan kemampuan mengambil keputusan yang benar sangat ditekankan. Nilai-nilai tersebut akan terlihat ketika jemaat menghadapi praktik politik uang. Oleh karena itu, penelitian ini penting bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga sebagai kontribusi dalam mempersiapkan pemimpin Kristen yang mampu menjaga keutuhan persekutuan jemaat di tengah dinamika politik yang lebih mengutamakan kepentingan tertentu.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak praktik politik uang di Gereja Toraja Jemaat Pongrea' Klasis Bittuang Se'seng berdasarkan teori rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak praktik politik uang terhadap kehidupan persekutuan jemaat di Gereja Toraja Jemaat Pongrea' Klasis Bittuang Se'seng dengan menggunakan teori Jurgen Habermas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperdalam mengenai Gereja dan Politik, terutama terkait dengan fenomena politik uang. Selain itu, hasil penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi gagasan dalam mengaplikasikan teori rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas dalam ranah teologi dan kepemimpinan Kristen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Gereja Toraja Jemaat Pongrea'

Khusus bagi Gereja Toraja Jemaat Pongrea', temuan dari riset ini diharapkan dapat berfungsi sebagai materi refleksi guna mempertahankan keutuhan persekutuan jemaat. Lebih lanjut, studi

ini dapat memfasilitasi para pemimpin gereja untuk mengembangkan pola komunikasi yang lebih transparan, tulus, dan akuntabel dalam menghadapi isu politik uang.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengalaman dan pemahaman peneliti dalam mengkaji mengenai praktik politik uang dalam konteks kehidupan bergereja, khususnya di Gereja Toraja Jemaat Pongrea' Klasik Bittuang Se'seng. Melalui penelitian ini, peneliti dapat belajar menerapkan teori rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas dalam menganalisis persoalan nyata yang terjadi di tengah jemaat.

c. Bagi Akademik

Studi ini diharapkan mampu menjadi sumber pelengkap dalam kegiatan perkuliahan pada bidang-bidang yang terkait, seperti mata kuliah Gereja dan Politik, Ilmu politik, Komunikasi politik dan Sosiologi Agama. Temuan-temuan yang diperoleh bisa dijadikan studi kasus konkret mengenai bagaimana seorang pemimpin Kristen merespons praktik politik uang di tengah kehidupan komunitas jemaat. Oleh karena itu, mahasiswa Program Studi Kepemimpinan Kristen akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban serta peran kepemimpinan dalam menjaga keutuhan dan mutu persekutuan jemaat.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN: Bagian ini membahas tentang latar belakang timbulnya permasalahan, perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian, manfaat yang diharapkan, serta sistematika penulisan laporan ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Dalam bab ini, disajikan landasan-landasan teoretis yang menjadi dasar penelitian, meliputi konsep mengenai politik uang, hubungan antara politik dan gereja, serta teori rasionalitas komunikatif yang digagas oleh Jurgen Habermas.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini memaparkan secara rinci mengenai jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan rentang waktu pelaksanaan penelitian, identifikasi informan penelitian, metode yang dipakai untuk pengumpulan data, instrumen yang digunakan, teknik analisis data, serta prosedur yang diterapkan untuk memastikan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini dipresentasikan gambaran umum lokasi studi, deskripsi detail dari temuan penelitian, analisis terhadap data yang diperoleh, dan diskusi mendalam mengenai hasil-hasil penelitian dengan berlandaskan pada kerangka teori yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi ringkasan berupa kesimpulan yang ditarik dari seluruh hasil penelitian, disertai dengan rekomendasi-

rekomendasi relevan yang ditujukan kepada gereja, jemaat, peneliti di masa mendatang, serta seluruh pihak yang memiliki kepentingan terkait.